

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Lombok.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ruslan, Rosady 2004, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin*, Penerbit Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sugiharto, R S.H.,M.H., 2012, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang.
- Sutedi, Adrian 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

POJK Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

### **C. JURNAL**

Faizal, Liky, “Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Nasional”, ASAS - Jurnal Hukum Ekonomi

Syariah UIN Raden Intan, Vol 4, No. 1, 2012

Satyayudhadananjaya, Nyoman, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Dikaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian”, Jurnal Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum, Vol IX, No. 1, September 2014.

Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, Vol. 27, Nomor 3, Oktober 2015

Supriyanta, “KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Jurnal Wacana Hukum, Vol VIII, No 1, April 2009,

#### **D. INTERNET**

Ihda Muktiyanto, Webinar “Mengenal Lebih Jauh pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan”, <https://www.youtube.com/watch?v=i9PD0UJATOI>, diakses 22 Juni 2023.

Manthovani, Redha, “Penerapan Asas Dominus Litis dalam UU KPK”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddf8ba3bb064/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-oleh--reda-manthovani/> diakses pada tanggal 29 April 2021

#### **E. HASIL PENELITIAN**

Hafid Triadmaja Syahputra, 2017, “Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Maulia Madina, 2020, “Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

#### **F. WAWANCARA**

AKP Taufan Setia Prawira, 2022, Seputar Subdit Fismondev POLDA Metro Jaya, Juni 2022.

Andrei Romario, S.H., 2022, Seputar Koordinasi POLRI dan OJK dalam menangani Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Mei 2022.

KOMPOL Abdillah Rifai, S.H., M.H., 2023, Seputar Koordinasi POLRI dan OJK dalam menangani Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan Seputar Dittipideksus Bareskrim Mabes POLRI \, Juli 2023.